BapendA Kabupaten Nunukan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif









RENCANA KERJA
TAHUN 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026** dapat disusun dengan baik.

Dokumen Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, yang berfungsi sebagai pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyusunan Renja ini juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026, serta memperhatikan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Dalam penyusunannya, dokumen ini telah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, kondisi aktual perekonomian daerah, serta berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Renja ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tahun 2026 dengan lebih terarah, efektif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Nunukan, Juli 2025
Kepala Badan



Fitraeni,.Sos
Nip.19731130 200112 2 002

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB II PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujauan 2

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 13

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 18

3.2. Tujuan dan Sasaran 20

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Nunukan 2025–2029. Pada periode ini, arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, serta penguatan tata kelola pendapatan berbasis digital.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah, meliputi penyusunan rencana strategis dan anggaran, serta pelaksanaan anggaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nunukan memegang peranan strategis dalam mendukung tercapainya target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2025–2029. Oleh karena itu, penyusunan RENJA Tahun 2026 dilakukan sebagai penjabaran tahunan dari RENSTRA 2025–2029, dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaab, pengendalian,, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan daerah jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1012);
5. Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026;
6. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 38 Tahun 2021 di Kabupaten Nunukan mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan;
7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2026 adalah sebagai acuan/arah bagi Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2026 berdasarkan ketersediaan sumberdaya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat uraian tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi, program dan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 berorientasi pada Urusan Pelayanan Dasar yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi kewenangan Daerah, sampai pada triwulan II pelaksanaan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan berjalan sebagai mestinya dengan tingkat capaian realisasi 3 program dan 26 sub kegiatan adalah 51,60% dan keuangan sebesar 51,15%.

a. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 10 paket
2. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 26 paket
3. Kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya dengan target 1 dokumen
4. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan target 2 unit
5. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan target 1 dokumen
6. Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan target 5 dokumen

Selain karena adanya efesiensi, faktor lain belum terealisasi kinerja

kegiatan adalah dokumen yang memang penyelesaiannya diakhir tahun.

b. Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah

c. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025

Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2025 (Tahun Akhir Periode Renstra)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja OPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025 (kumulatif Triwulan I dan Triwulan II)		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025		Catatan Penting
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(10)= 8/6 *100	(11)= 9/7*100	12
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
	Bidang Urusan Perencanaan										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**6.410.745.756**	**100%**	**7.220.009.887**	38,04%	3.943.004.068	38,04	54,61	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	15.000.000	2	17.198.000	1	0	50	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD danlaporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	10.000.000	3	2.018.500	2	0	67	0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	155 orang/bulan	16.473.072.480	31	6.004.784.716	31	3.733.485.012	100	62,18	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	522.935.000	10	99.540.000	0	0	0	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan	215 paket	370.711.250	43	153.174.644	20	8.338.000	46,51	5,44	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	130 paket	1.136.965.000	26	221.184.650	0	0	0	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporam	549.456.000	5	313.093.000	3	57.904.296	22,80	18,49	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 laporan	383.713.000	12	73.992.600	6	18.180.000	50	24,57	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 laporan	10.832.313.550	12	251.643.216	6	117.618.460	50	46,74	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	105 unit	328.187.500	21	59.830.561	7	7.478.300	33,33	12,50	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	35 unit	225.000.000	7	23.550.000	7	0	100	0	
	Program pengelolaan keuangan	Persentase penerimaan dana transfer ke daerah									
	koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	5 dokumen	1.190.396.000	1	328.216.000	1	9.994.540	100	3,05	
	Program pengelolaan pendapatan	Persentase Pertumbuhan pajak daerah									
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	10 dokumen	250.000.000	2	86.271.000	1	30.811.980	50	35,72	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	9 laporan	1.000.000.000	2	55.650.000	0	0	0	0	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	10 unit	500.000.000	2	130.642.000	0	0	0	0	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	60 laporan	750.000.000	12	238.448.000	3	26.840.000	25	11,26	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	17 dokumen	230.136.000	4	55.073.800	3	11.760.000	75	15,66	

	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	25 laporan	500.000.000	5	201.714.000	2	11.970.000	40	5,93	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	120 layanan	50.000.000	120	11.340.000	20	0	16,67	0	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	326170 laporan	250.000.000	69011	203.022.000	69011	23.620.000	100	5,88	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	25 objek pajak	1.001.307.400	5	249.339.500	1	10.074.318	20	4,04	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	326770 dokumen	1.326.123.000	69131	115.360.000	69131	64.645.000	100	56,04	
	Penagihan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	26 dokumen	1.001.307.400	5	207.120.000	3	29.090.000	60	14,04	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	25 dokumen	100.000.000	5	19.680.000,	0	0	0	0	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	110 dokumen	588.914.000	22	251.422.300	5	28.777.812	23	11,45	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah	35 laporan	100.000.000	7	147.832.300	2	26.110.000	28,57	18,41	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0 laporan	0	2	98.724.000	2	44.258.472	100	44,83	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Menurut rancangan Rencana Strategis Badan pendapatan Daerah 2025-2029, tujuan dan sasaran yang selaras NSPK dan sasaran RPJMD adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan sasaran Meningkatnya Penerimaan PAD dengan indikator Persentase Peningkatan PAD. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan tahun 2025 hingga triwulan ke II dengan perbandingan laporan realisasi pendapatan tahun 2025 triwulan ke II maka persentase peningkatan PAD adalah sebesar 3,06%. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah hingga triwulan ke II tahun 2025:

Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Persentase Pertumbuhan PAD		-	12,30%	1,94%	2,75%	2,86%	2,86%	-35,96%	68,84%	-63,11%	2,86%	2,86%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan juga memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Nunukan dapat dikemukan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyesuaian target penerimaan pajak dengan potensi riil daerah
2. Belum optimalnya ketersediaan data subjek dan objek pajak daerah
3. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah

Pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada masyarakat, akan terjadi peningkatan jumlah output barang dan/atau jasa yang diikuti pula meningkatnya jumlah uang yang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan pemerintah daerah. Kemudian akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang mana nilai PDRB inilah yang menjadi indikator dalam pertumbuhan ekonomi. Maka proses ini juga bisa berdampak pada dukungan terhadap visi Bupati Nunukan 2025-2029 yakni Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri.

Strategi ditempuh Badan pendapatan daerah dalam menghadapi permasalahan yang ada yaitu Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui Penguatan Basis Data dan Informasi Pajak, Digitalisasi Sistem Pemungutan, Penyesuaian Target Berdasarkan Potensi Riil, serta Peningkatan Kepatuhan, Pengawasan, dan Kapasitas SDM dengan kebijakan Meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah melalui penguatan basis data dan informasi pajak, percepatan digitalisasi dan elektronifikasi sistem pemungutan, penetapan target berbasis potensi riil, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan fungsi pengawasan dan penagihan, serta pengembangan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah.

2.4.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2026 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2020 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2020 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas yang dapat mendukung pembangunan Kabupaten Nunukan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Nunukan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Nunukan**	**Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**8.040.346.476**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kabupaten Nunukan**	**Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**7.220.009.887**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	17.198.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD danlaporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD danlaporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	2.018.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN kantor yang disediakan	28 Orang	6.756.737.248,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN kantor yang disediakan	31 Orang	6.004.784.716,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	104.587.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	99.540.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah paket logistik yang disediakan	43 Paket	156.774.610	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah paket logistik yang disediakan	43 Paket	153.174.644,00	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Nunukan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7 Paket	219.161.325	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Nunukan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	26 Paket	221.184.650,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	313.093.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Nunukan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	72.732.531	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Nunukan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan	72.732.531	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	287.264.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 laporan	251.643.216,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Nunukan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 unit	53.339.602	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Nunukan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 unit	59.830.561,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7 unit	34.750.000	Pemeliaraan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7 unit	23.550.000,00	
	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	**Kabupaten Nunukan**	**Persentase Pertumbuhan pajak daerah**	**2,38%**	**17.525.126.981**	**Program Pengelolaan Pendapatan daerah**	**Kabupaten Nunukan**	**Persentase Pertumbuhan pajak daerah**	**2,38%**	**2.169.287.100,00**	

	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 Dokumen	100.000.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 Dokumen	86.271.000,00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	2 Laporan	100.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	2 Laporan	55.650.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 Unit	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 Unit	150.000.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12 Laporan	250.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12 Laporan	238.448.000,00	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	4 Dokumen	100.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	4 Dokumen	147.791.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	5 Laporan	250.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	5 Laporan	201.714.000,00	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	120 layanan	10.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	1 120 layanan	11.340.000,00	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	69011 laporan	450.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6 7436 laporan	203.022.000,00	

	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Nunukan	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	5 obyek pajak	275.000.009	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Nunukan	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	5 obyek pajak	249.339.500,00	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	69131 dokumen	250.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	6 69131 dokumen	115.360.000,00	
	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 dokumen	298.546.200	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 dokumen	207.120.000,00	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	5 dokumen	19.500.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	5 dokumen	19.680.000,00	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	22 dokumen	255.231.100	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	2 2 dokumen	251.422.300,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah	7 Laporan	161.952.300	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah	7 Laporan	152.763.300,00	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah	2 Laporan	201.281.400	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah	2 Laporan	98.724.000,00	

			Daerah					Daerah			
	Program Pengelolaan Keuangan daerah	**Provinsi Kalimantan Utara**	**Persentase penerimaan dana transfer ke daerah**	**100%**	**320.000.000**	**Program Pengelolaan Keuangan daerah**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**Persentase penerimaan dana transfer ke daerah**	**100%**	**328.216.000,00**	
	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	1 dokumen	320.000,00	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	1 dokumen	328.216.000,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Melalui PAD, daerah diharapkan mampu membiayai sendiri sebagian besar kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, arah kebijakan nasional yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas fiskal daerah memiliki dampak langsung terhadap kinerja PAD.

A. Kebijakan Nasional yang Relevan

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

UU ini merupakan landasan utama dalam reformasi kebijakan fiskal nasional yang menggantikan UU No. 33 Tahun 2004. Beberapa poin penting yang berpengaruh terhadap PAD:

- Penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) untuk meningkatkan efektivitas pemungutan.
- Peningkatan kewenangan daerah dalam pengelolaan pajak, termasuk digitalisasi layanan pajak dan insentif bagi daerah dengan kinerja pemungutan yang baik.
- Skema bagi hasil yang lebih adil dan transparan guna mendorong daerah meningkatkan potensi pendapatannya.
- Penguatan prinsip *revenue sharing* dan *local taxing power* untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal antar-daerah.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029

RPJMN menekankan:

1. Transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, di mana penguatan fiskal daerah menjadi pilar penting.
2. Dorongan terhadap digitalisasi sistem perpajakan daerah dan integrasi

data fiskal.

3. Peningkatan kualitas belanja daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan efisiensi pemungutannya.

c. Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Melalui kebijakan TKDD, pemerintah pusat memberikan insentif fiskal bagi daerah yang mampu:

1. Meningkatkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah;
2. Menerapkan inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi;
3. Mewujudkan kemandirian fiskal melalui pengelolaan PAD yang efektif dan akuntabel.

B. Implikasi terhadap Pemerintah Daerah

Kebijakan nasional tersebut menuntut pemerintah daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah, untuk:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berbasis potensi ekonomi lokal.
2. Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah melalui digitalisasi (e-tax, e-retribusi, integrasi data wajib pajak).
3. Menyesuaikan perda-perda pajak dan retribusi agar selaras dengan UU HKPD dan kebijakan turunan seperti PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD.
4. Membangun kolaborasi lintas sektor (Bappeda, Dinas Teknis, dan lembaga pusat) untuk optimalisasi PAD.
5. Meningkatkan kapasitas SDM dan sistem pengawasan internal dalam pengelolaan PAD.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2025 – 2029. Adapun tujuan dan sasaran

Rencana Kerja Tahun 2026 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

a. Tujuan : Optimalisasi kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator kinerja: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah memiliki arti strategis karena semakin tinggi proporsinya, semakin besar pula tingkat kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan program pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat.

Optimalisasi kontribusi PAD diarahkan pada upaya peningkatan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

b. Sasaran : 1. Meningkatnya Penerimaan PAD

Indikator kinerja: Persentase peningkatan PAD (%)

Dengan strategi ini, diharapkan setiap tahun terjadi pertumbuhan positif terhadap capaian PAD yang konsisten dan berkelanjutan. Persentase peningkatan PAD dari tahun ke tahun, yang mencerminkan efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator kinerja: Nilai Sakip (Nilai)

Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan bahwa instansi pemerintah mampu melaksanakan program dan kegiatan secara lebih terukur, efisien, dan bertanggung jawab, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel T-C33. Tabel ini berisi program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah dan RPJMD Kabupaten Nunukan.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah ditahun 2026 sebanyak 3 (tiga) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan tersebut adalah 11.030.576.076,00. Nilai total untuk setiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel T-C33 berikut.

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/ APBN-DAK
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI KEGIATAN	
1	2	3		4	5	6	7
	Urusan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN						
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	8.040.346.476	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	5	**5.000.000**	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	3.000.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD danlaporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	2.000.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.2	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen pengelolaan retribusi daerah	laporan	2	**50.000.000**	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	dokumen	1	25.000.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	1	25.000.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	dokumen	24	**6.756.737.248**	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	28	6.756.737.248,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	laporan	4	**830.522.935**	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	10	104.587.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan	paket	43	156.774.610	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	7	219.161.325	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5	350.000.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	2	**359.996.691**	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	72.732.531	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	12	287.264.160	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang milik Daerah yang dipelihara	unit	28	**88.089.602**	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	21	53.339.602	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	7	34.750.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Pertumbuhan pajak daerah	%	2,38	2.670.229.600	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.1	**Pengelolaan pendapatan daerah**	Jumlah pajak daerah	Rp	17.525.126.981	2.670.229.600	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	2	100.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Laporan	2	100.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	2	150.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	laporan	12	250.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	4	100.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	Laporan	5	250.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	layanan	120	10.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	69011	450.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	obyek pajak	5	275.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	dokumen	69131	250.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penagihan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	dokumen	5	298.546.200	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	dokumen	5	19.500.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	dokumen	22	255.231.100	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah	Laporan	7	161.952.300	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	200.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penerimaan dana transfer ke daerah	%	100	320.000.000	DKI Jakarta Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah	kali	6	320.000.000	DKI Jakarta Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	dokumen	1	320.000.000	DKI Jakarta Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Jumlah				11.030.576.076		

Nunukan, Juli 2025
Kepala Badan

Fitraeni, S.Sos
NIP.19731130 200112 2 002

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai sasaran strategis peningkatan pendapatan asli daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renja ini telah melalui tahapan analisis terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, identifikasi permasalahan dan tantangan, serta penetapan prioritas pembangunan tahun 2026. Dengan demikian, Renja ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan.

Pelaksanaan Renja Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, memperluas basis pendapatan, serta mengoptimalkan sistem digitalisasi pelayanan pendapatan. Semua upaya ini bertujuan untuk mendukung kemandirian fiskal daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen ini, seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan diharapkan dapat berkomitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara konsisten, terukur, dan akuntabel. Penguatan koordinasi lintas bidang serta kerja sama dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, pelaksanaan Renja ini akan senantiasa dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas capaian kinerja serta melakukan penyesuaian terhadap dinamika kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi

daerah. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2026 nantinya akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, serta menjadi bahan masukan dalam penajaman kebijakan strategis di bidang pendapatan daerah.

Dengan semangat kerja sama dan komitmen bersama, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memperkuat kemampuan keuangan daerah demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan masyarakat Nunukan yang sejahtera.

Nunukan, Juli 2025
Kepala Badan



Fitraeni,.Sos
Nip.19731130 200112 2 002

LAMPIRAN

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. NUNUKAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**9.717.512.987,00**							**12.823.851.185,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.717.512.987,00**							**12.823.851.185,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**9.717.512.987,00**							**12.823.851.185,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.527.498.212,00**						**-**	**9.723.471.185,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	45.429.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	18.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	16.661.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.097.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	28.768.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.702.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.608.375.496,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.223.482.325,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	7.608.375.496,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.223.482.325,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	596.659.890,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.031.884.650,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	20.750.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		181.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				45 Paket	122.653.240,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		229.900.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	218.874.650,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		221.184.650,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	234.382.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		399.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	207.702.276,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	213.007.288,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	73.992.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		73.992.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	133.709.676,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		139.014.688,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	69.331.550,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	236.296.922,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	52.381.550,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		86.296.922,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	16.950.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**106.280.000,00**						**-**	**280.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	106.280.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	280.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Dokumen	106.280.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		280.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**1.083.734.775,00**						**-**	**2.820.380.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.083.734.775,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.820.380.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	86.017.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	69.335.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	128.426.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		175.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	92.242.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				5 Laporan	45.222.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		338.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				5 Laporan	92.648.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2200 Obyek Pajak	48.004.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				65300 Dokumen	107.608.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				4 Dokumen	26.300.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				5 Dokumen	138.766.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		207.120.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				3 Dokumen	8.860.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.460.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				50 Dokumen	92.036.095,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		275.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				5 Laporan	69.098.180,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	79.172.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		209.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H							**9.717.512.987,00**							**12.823.851.185,00**	

Nunukan, September 2025
Kepala Badan



Fitraeni, S.Sos
Nip.19731130 200112 2 002